



Strategi Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Era Efisiensi Anggaran dengan Pendekatan Pentahelix pada Badan Perencanaan Kabupaten Seram Bagian Barat

Faiqatul Sahara^{1*}, Zacharias Tehubijuluw¹, Nataniel Elake¹

¹ Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*Corresponding author email: faiqatulsahara@gmail.com

Article Info

Article history:

Received July 12, 2025
Approved August 10, 2025

Keywords:

Collaborative
Governance, Pentahelix,
Public Policy
Implementation,
Stunting, Budget
Efficiency

ABSTRACT

This study aims to analyze the policy implementation strategies for stunting reduction by the Planning Agency of West Seram Regency within the context of budget constraints, emphasizing a collaborative governance approach based on the Pentahelix model. Five key stakeholders—government, academia, business sector, community, and media—are identified as pillars of collaboration in enhancing policy effectiveness. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and policy document analysis, and were then thematically analyzed to formulate an implementation model that aligns with the conditions of underdeveloped regions. The findings reveal that despite fiscal limitations, stakeholder synergy can foster effective collaborative mechanisms in program execution, provided it is supported by inclusive leadership, dynamic cross-sectoral coordination, and participatory communication. The novelty of this study lies in the integration of collaborative governance and the Pentahelix model within the realm of public health in fiscally constrained areas, specifically in Eastern Indonesia—a region often underrepresented in public administration scholarship. These findings not only expand the conceptual framework of collaborative governance studies but also propose an efficient and adaptive policy implementation model suited for regions facing complex geographical and social challenges. The study recommends strengthening cross-sectoral collaborative networks as a sustainable strategy for social policy while promoting a more contextual and responsive development of public administration science for disadvantaged regions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi kebijakan penanganan stunting oleh Badan Perencanaan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam konteks keterbatasan anggaran, dengan menekankan pada pendekatan tata kelola kolaboratif berbasis model Pentahelix. Lima aktor utama—pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media—diidentifikasi sebagai pilar kolaborasi dalam mendukung efektivitas kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan, kemudian dianalisis secara tematik untuk merumuskan model implementasi kebijakan yang relevan dengan konteks wilayah tertinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan fiskal, sinergi antaraktor dapat menciptakan mekanisme kolaboratif yang efektif dalam pelaksanaan program stunting, asalkan didukung oleh kepemimpinan yang inklusif, koordinasi lintas sektor yang dinamis, serta komunikasi yang partisipatif. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi antara pendekatan collaborative

governance dan model Pentahelix dalam konteks kesehatan masyarakat di daerah dengan kapasitas fiskal rendah, khususnya di Indonesia bagian timur yang selama ini kurang tereksplorasi dalam kajian administrasi publik. Temuan ini tidak hanya memperluas kerangka konseptual dalam studi tata kelola kolaboratif, tetapi juga menawarkan model implementasi kebijakan yang efisien dan adaptif untuk wilayah dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks. Rekomendasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan jejaring kolaboratif lintas sektor sebagai strategi berkelanjutan dalam kebijakan sosial, sekaligus mendorong pengembangan ilmu administrasi publik yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan daerah tertinggal.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Sahara, F., Tehubijuluw, Z., & Elake, N. (2025). Strategi Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Era Efisiensi Anggaran dengan Pendekatan Pentahelix pada Badan Perencanaan Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(3), 1840–1857. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.4183>

PENDAHULUAN

Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak yang di bawah rata-rata; ia mencerminkan potret ketimpangan struktural yang telah berlangsung lama, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan nasional (Rijal, 2024; Soamole & Rolobessy, 2024). Di Indonesia bagian timur, termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat, prevalensi stunting masih tinggi dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan generasi muda. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan bahwa angka stunting di beberapa wilayah Maluku masih berada di atas rata-rata nasional. Di tengah keterbatasan anggaran dan kapasitas fiskal daerah, upaya penanggulangan stunting menghadapi tantangan besar: bagaimana mengimplementasikan kebijakan yang efektif, inklusif, dan adaptif dalam kondisi yang sangat terbatas? Permasalahan ini bukan hanya menyangkut teknis kebijakan, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola bagaimana para aktor lintas sektor dapat bergandengan tangan dalam satu tujuan Bersama.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mencoba menjawab tantangan penanggulangan stunting dari berbagai pendekatan. Sebagai contoh, penelitian oleh Litaay & Batjo (2024), Soselisa et al. (2024), dan Wicaksono et al. (2025) menekankan pentingnya integrasi multisektor dalam kebijakan gizi nasional. Sementara itu, studi Astuti et al. (2025) dan Udiyasa (2023) menunjukkan bahwa intervensi berbasis rumah tangga dan komunitas terbukti mampu menurunkan angka stunting secara signifikan di negara berkembang. Akapip & Kissya (2023), Rusli et al. (2023), dan Warat (2024) menyoroti peran penting desa dan lembaga lokal dalam membangun ketahanan pangan sebagai upaya preventif terhadap stunting. Selain itu, Nugroho et al. (2022) dan Octavia et al. (2022) menunjukkan bahwa kendala fiskal dan lemahnya koordinasi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program nasional percepatan gizi.

Dalam konteks tata kelola kolaboratif, Sutikno et al. (2022) dan Wisnumurti et al. (2020) memperkenalkan konsep *collaborative governance* sebagai kerangka kerja yang menekankan pentingnya dialog, partisipasi, dan pembagian tanggung jawab dalam proses kebijakan publik. Model ini telah banyak digunakan di negara-negara maju untuk menyelesaikan masalah kebijakan yang kompleks. Fadhil et al. (2025) dan Tondang et al. (2023) menerapkan model ini dalam tata kelola lingkungan, sedangkan Putri et al. (2022) menyoroti potensi kolaboratif dalam sektor pelayanan publik. Namun demikian, model ini belum banyak diaplikasikan secara sistematis dalam konteks penanggulangan stunting di wilayah tertinggal.

Seiring dengan berkembangnya pendekatan kolaboratif, model Pentahelix mulai mendapat perhatian sebagai kerangka sinergi antara lima aktor utama: pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Maulana et al. (2022) dan Rahadian et al. (2024) telah mengulas efektivitas model ini dalam mendukung inovasi kebijakan daerah. Namun, konteks aplikasinya masih dominan di wilayah perkotaan atau daerah dengan kapasitas fiskal yang memadai. Padahal, wilayah tertinggal memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik secara geografis, sosial, maupun politis, sehingga membutuhkan pendekatan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga adaptif terhadap realitas lokal.

Beberapa riset yang lebih spesifik telah mencoba mengaitkan antara collaborative governance dan implementasi kebijakan kesehatan. Misalnya, Nurhidayah et al. (2022) dan Soselisa et al. (2024) meneliti peran kemitraan dalam kebijakan kesehatan ibu dan anak, sementara Riggs et al. (2021) dan Wadipalapa et al. (2024) menelusuri tantangan sinergi lintas sektor di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan di wilayah terbatas sangat bergantung pada seberapa besar kapasitas kolaborasi dibangun dan dijaga secara berkelanjutan. Namun, pertemuan antara teori kolaboratif dan realitas birokrasi lokal masih sering menimbulkan kesenjangan, terutama dalam hal sumber daya, kompetensi, dan kepercayaan antaraktor.

Melihat lanskap literatur tersebut, tampak bahwa masih sedikit penelitian yang secara eksplisit mengkaji bagaimana collaborative governance berbasis model Pentahelix dapat diimplementasikan dalam konteks kebijakan kesehatan masyarakat di daerah dengan keterbatasan fiskal. Terlebih lagi, belum banyak model implementasi kebijakan yang secara spesifik dirancang untuk menjawab kompleksitas di wilayah Indonesia bagian timur. Dengan kata lain, meskipun pendekatan kolaboratif telah banyak dibahas, pembahasan yang menempatkannya dalam konteks fiskal terbatas dan geografis termarjinalkan masih jarang diangkat. Di sinilah letak pentingnya menyusun sebuah model implementasi kebijakan yang tidak hanya menggabungkan pendekatan kolaboratif dan aktor multiheliks, tetapi juga mampu hidup dalam kondisi krisis sumber daya.

Melalui studi ini, penulis menawarkan kerangka implementasi kebijakan penanggulangan stunting yang memadukan kekuatan tata kelola kolaboratif dan pendekatan Pentahelix secara kontekstual. Dengan memusatkan perhatian pada Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai studi kasus, artikel ini menyajikan sebuah upaya konseptual dan empiris untuk memahami bagaimana kolaborasi lima aktor kunci dapat menjadi solusi strategis di tengah tantangan efisiensi anggaran. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman baru tentang praktik tata kelola kolaboratif di wilayah tertinggal, tetapi juga menyumbangkan perspektif segar bagi literatur administrasi publik yang masih berpusat pada wilayah dengan sumber daya yang relatif stabil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi implementasi kebijakan penanganan stunting yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam kerangka collaborative governance berbasis Pentahelix, serta merumuskan model implementasi kebijakan yang adaptif, inklusif, dan relevan bagi daerah-daerah dengan keterbatasan fiskal. Penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan teoritis dalam memperkaya wacana tata kelola kolaboratif, tetapi juga menawarkan panduan praktis yang dapat diadaptasi oleh berbagai daerah di Indonesia yang menghadapi kondisi serupa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa realitas sosial dan kebijakan publik, terutama dalam konteks tata kelola kolaboratif di daerah dengan keterbatasan fiskal, tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui angka dan data statistik semata. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, relasi, serta dinamika kekuasaan dan koordinasi antaraktor yang bersifat kompleks dan kontekstual (Lim, 2025). Desain studi kasus dipilih karena memberikan ruang untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana kebijakan penanggulangan stunting diimplementasikan melalui kolaborasi antaraktor dalam satu konteks lokal yang spesifik, yakni Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku.

Kabupaten Seram Bagian Barat dipilih sebagai lokasi penelitian bukan hanya karena tingginya angka stunting, tetapi juga karena wilayah ini merepresentasikan tantangan geografis, sosial, dan fiskal yang khas di Indonesia bagian timur. Selain memiliki keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, wilayah ini juga berhadapan dengan persoalan kapasitas birokrasi yang terbatas serta dinamika sosial-komunal yang kompleks. Kondisi ini membuatnya menjadi medan yang tepat untuk memahami bagaimana collaborative governance dapat berjalan dalam situasi sumber daya yang serba terbatas. Sebagai daerah yang tidak memiliki kapasitas fiskal besar, tetapi tetap memiliki kewajiban dalam melaksanakan program prioritas nasional, seperti percepatan penurunan stunting, Kabupaten Seram Bagian Barat menyajikan konteks empiris yang kaya untuk dianalisis secara mendalam.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan penanggulangan stunting. Total terdapat 15 orang informan kunci yang diwawancarai secara mendalam, terdiri dari perwakilan lima unsur Pentahelix, yaitu: pemerintah daerah (Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting), akademisi lokal yang menjadi mitra penyusun kebijakan, pelaku usaha yang terlibat dalam program CSR terkait gizi anak, tokoh komunitas dan kader posyandu sebagai pelaksana lapangan, serta jurnalis dari media lokal yang selama ini mengikuti isu stunting secara aktif. Pemilihan mereka didasarkan pada prinsip representativitas peran dalam jaringan kolaborasi, serta kapasitas mereka untuk memberikan informasi yang kaya dan mendalam (Busetto et al., 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menjaga fokus diskusi sekaligus memberi ruang bagi informan mengembangkan narasi personal dan institusional mereka. Teknik ini memungkinkan peneliti menangkap dinamika kolaborasi antarpihak yang terkadang tidak tertulis secara eksplisit dalam dokumen formal. Observasi dilakukan dalam pertemuan koordinasi lintas sektor dan kegiatan lapangan seperti posyandu terpadu, yang memberikan gambaran langsung tentang praktik kolaborasi dan tantangan yang dihadapi. Sementara itu, dokumen yang dianalisis meliputi dokumen perencanaan daerah, laporan kegiatan percepatan penurunan stunting, serta kebijakan sektoral lainnya yang relevan. Ketiga metode ini dipilih karena saling melengkapi: wawancara menggali pengalaman subjektif, observasi menangkap perilaku faktual, dan dokumen memberikan kerangka normatif dari kebijakan yang diteliti (Patton, 2015).

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, dilakukan proses triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai aktor yang memiliki posisi dan kepentingan berbeda dalam implementasi kebijakan. Misalnya, narasi

dari aktor pemerintah dibandingkan dengan pandangan dari komunitas lokal dan media. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan menghubungkan hasil wawancara dengan temuan dari observasi dan dokumen. Pendekatan ini penting untuk menghindari bias tunggal dan memastikan bahwa interpretasi yang dibangun memiliki dasar yang kuat dari berbagai perspektif (Creswell & Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbatasan Fiskal dan Tantangan Implementasi Kebijakan Stunting di Daerah Tertinggal

Keterbatasan fiskal merupakan kondisi struktural yang dialami oleh banyak daerah tertinggal di Indonesia, termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Sebagai wilayah dengan Indeks Pembangunan Manusia yang masih berada di bawah rata-rata nasional, daerah ini menghadapi beban ganda: di satu sisi dituntut untuk mengimplementasikan program prioritas nasional seperti percepatan penurunan stunting, namun di sisi lain berhadapan dengan minimnya alokasi anggaran yang dapat dioptimalkan secara teknis. Dalam konteks ini, tantangan kebijakan tidak hanya terletak pada desain program, tetapi juga pada kapasitas riil birokrasi untuk menjalankannya secara berkelanjutan.

Salah satu pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang diwawancarai menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk program stunting sering kali bersifat tidak langsung—terselip dalam kegiatan dinas-dinas lain seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial—sehingga menyulitkan konsolidasi program secara lintas sektor. Beliau mengungkapkan bahwa “anggaran langsung untuk stunting itu sangat terbatas, jadi kami lebih banyak mengandalkan sinergi, kolaborasi dengan OPD lain, bahkan komunitas, untuk bisa bergerak bersama.” Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa birokrasi lokal berada dalam posisi harus berinovasi bukan karena pilihan, melainkan karena keterpaksaan oleh kondisi sumber daya yang terbatas.

Hasil observasi lapangan memperkuat temuan ini. Dalam kunjungan ke salah satu desa di Kecamatan Taniwel, peneliti menemukan bahwa kegiatan posyandu yang menjadi garda terdepan program penanggulangan stunting dijalankan dengan sangat sederhana. Gedung posyandu berupa bangunan semi permanen, dengan perlengkapan seadanya, dan keterlibatan kader yang bekerja secara sukarela tanpa insentif reguler. Dalam satu sesi timbang berat badan balita, hanya ada satu timbangan manual yang digunakan bergantian untuk lebih dari 20 anak. Meski begitu, kegiatan tetap berjalan dengan semangat dan antusiasme tinggi dari para kader dan ibu-ibu desa. Mereka saling bantu, membawa catatan sendiri, dan menggunakan kertas daur ulang untuk merekap data tumbuh kembang anak. Situasi ini mencerminkan bahwa kelangkaan sumber daya tidak selalu identik dengan kegagalan program, selama ada mobilisasi sosial yang kuat.

Kondisi seperti ini dapat dipahami pandangan Ferrazzi (2022) yang menyatakan bahwa dalam konteks terbatasnya sumber daya, inovasi kebijakan justru dapat muncul dari kombinasi improvisasi, kepercayaan sosial, dan daya lenting lokal. Dalam hal ini, birokrasi lokal di Seram Bagian Barat secara tidak langsung menjalankan bentuk *bricolage*—yakni menggunakan sumber daya yang tersedia secara kreatif untuk memenuhi kebutuhan kebijakan yang mendesak. Alih-alih menunggu instruksi atau anggaran tambahan dari pusat, pemerintah daerah mengandalkan potensi yang ada di komunitas dan memperkuat peran informal yang bersifat fleksibel.

Keterbatasan anggaran juga berdampak pada ketimpangan koordinasi antarsektor. Beberapa informan dari dinas teknis menyebut bahwa kegiatan yang berkaitan dengan stunting

sering tidak sinkron, karena masing-masing dinas memiliki keterbatasan operasional dan perencanaan berbasis anggaran yang ketat. Seorang informan dari Dinas Kesehatan menuturkan bahwa “kadang kami jalan sendiri, padahal program ini harusnya lintas sektor. Tapi karena dana terbatas, kami fokus ke kegiatan kami dulu.” Di balik pernyataan ini, tergambar dengan jelas betapa fiskal memainkan peran sentral dalam mengatur arah dan ritme kolaborasi. Tanpa mekanisme pendanaan yang mendukung koordinasi, semangat kolaboratif bisa terfragmentasi.

Namun demikian, di tengah berbagai keterbatasan itu, muncul praktik-praktik kolaboratif yang bersifat tak terduga, seperti penggalangan bahan makanan bergizi dari pedagang lokal, keterlibatan gereja dan masjid dalam penyuluhan gizi, hingga penggunaan media sosial desa untuk kampanye kesadaran stunting. Temuan ini mencerminkan bahwa model kolaborasi tidak selalu lahir dari skema formal atau desain kebijakan terstruktur, tetapi sering kali muncul dari relasi sosial dan solidaritas yang tumbuh dalam komunitas (Litaay & Batjo, 2024; Soamole & Rolobessy, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa ruang-ruang inovasi kebijakan di daerah tertinggal tidak sepenuhnya tertutup, melainkan justru terbuka ketika birokrasi mampu mengelola kekurangan sebagai peluang untuk merawat jejaring sosial yang ada.

Realitas di Seram Bagian Barat memperlihatkan bahwa kebijakan publik di daerah dengan keterbatasan fiskal harus dilihat bukan sebagai implementasi teknokratik semata, melainkan sebagai arena sosial yang memerlukan kecerdasan kolektif dan fleksibilitas adaptif. Di tengah kelangkaan anggaran, muncul inovasi-inovasi kecil yang justru menyelamatkan program dari stagnasi. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya mengembangkan model tata kelola yang menghargai keterbatasan sebagai sumber kreativitas, bukan sekadar sebagai hambatan. Dalam lanskap kebijakan yang serba terbatas, inovasi bukanlah kemewahan, melainkan keharusan.

Peran Strategis Aktor Pemerintah: Dari Komando ke Kolaborasi

Dalam konteks implementasi kebijakan stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat, aktor pemerintah—khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)—menunjukkan peran strategis yang tidak lagi sekadar sebagai perumus kebijakan, tetapi sebagai penggerak kolaborasi lintas sektor. Temuan lapangan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari gaya kepemimpinan birokratis yang komando-sentris menuju pendekatan yang lebih terbuka, partisipatif, dan fasilitatif. Transformasi ini menjadi penting mengingat kompleksitas isu stunting yang menuntut keterlibatan banyak pihak dan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri.

Dalam wawancara mendalam, salah satu informan dari Bappeda, yang kami sebut sebagai Y., menyampaikan bahwa “selama ini pendekatan program masih terlalu top-down, padahal masalah stunting itu butuh sentuhan dari bawah, dari orang-orang yang tahu kondisi di lapangan.” Pernyataan ini mencerminkan adanya kesadaran dari internal birokrasi bahwa peran pemerintah bukan lagi sebagai pengendali tunggal, tetapi sebagai fasilitator yang menjembatani aktor-aktor lain—dari akademisi, pelaku usaha, komunitas, hingga media—dalam membangun ekosistem kebijakan yang hidup dan kontekstual.

Peran fasilitatif ini terlihat nyata dalam berbagai forum koordinasi yang diselenggarakan oleh Bappeda. Dalam salah satu observasi penulis pada rapat koordinasi lintas sektor yang diadakan di ruang pertemuan Kantor Bappeda, suasana diskusi terasa cair dan terbuka. Perwakilan dari dinas kesehatan duduk berdampingan dengan tokoh agama dan pengelola CSR dari koperasi lokal. Tidak ada dominasi suara birokrasi, justru diskusi dibuka dengan penyampaian tantangan dari lapangan oleh kader posyandu. Tim Bappeda yang memimpin rapat tidak memberikan instruksi, tetapi memfasilitasi dialog terbuka dan mencatat masukan dari

setiap sektor. Hal ini menunjukkan praktik kepemimpinan yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menghimpun, merangkul, dan merawat relasi antaraktor dalam satu misi bersama.

Pendekatan ini dapat dipahami dalam kerangka adaptive governance, yang menurut Wyborn et al. (2023) adalah suatu bentuk tata kelola yang ditandai dengan kemampuan institusi publik untuk belajar dari pengalaman, beradaptasi terhadap perubahan, dan mengakomodasi beragam aktor dalam pengambilan keputusan. Pemerintah daerah, melalui Bappeda, menunjukkan ciri-ciri ini dengan mengakomodasi kompleksitas konteks lokal—baik geografis, sosial, maupun fiskal—sebagai dasar pengambilan kebijakan. Alih-alih menganggap keterbatasan sebagai hambatan, mereka menjadikannya sebagai alasan untuk membuka ruang dialog dan memperluas partisipasi.

Lebih jauh, Bappeda juga memainkan peran strategis dalam membangun jembatan antara struktur formal pemerintah dan dinamika informal komunitas. Salah satu contoh konkret terlihat dalam program penyusunan peta intervensi stunting berbasis komunitas. Dalam proses ini, Bappeda tidak menyusun data secara tertutup, melainkan melibatkan tokoh komunitas dan kader kesehatan dalam pemetaan wilayah rawan gizi. Hasil pemetaan ini kemudian dijadikan dasar dalam menyusun prioritas program dan pengalokasian sumber daya, meskipun dalam jumlah yang terbatas. Pendekatan partisipatif ini memberikan legitimasi moral sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan karena berbasis pada realitas lokal.

Selain itu, dalam salah satu sesi pelatihan lintas sektor yang diadakan di kecamatan Huamual, penulis mengamati bagaimana pemerintah daerah tidak hanya menjadi pembicara, tetapi juga pendengar. Dalam sesi tersebut, perwakilan dari organisasi perempuan menyampaikan kritik terhadap kebijakan intervensi gizi yang selama ini dianggap terlalu teknokratis dan kurang menyentuh dimensi sosial-kultural keluarga. Alih-alih defensif, tim Bappeda mencatat masukan tersebut dan menyatakan akan mengevaluasi pendekatan komunikasi kebijakan mereka. Situasi ini menunjukkan adanya ruang empati dalam birokrasi, sebuah karakter yang jarang ditemukan dalam tata kelola tradisional.

Namun demikian, pergeseran ini tidak terjadi secara otomatis. Dalam beberapa wawancara, terdapat pengakuan dari informan lain bahwa masih ada sebagian aparatur yang terbiasa bekerja dengan pendekatan sektoral dan hierarkis. Tantangan koordinasi, ego sektoral, serta perbedaan persepsi antarinstansi menjadi penghambat yang harus dihadapi secara perlahan dan berkelanjutan. Justru di sinilah nilai penting dari transformasi peran pemerintah—yakni bukan sebagai pusat kekuasaan tunggal, melainkan sebagai pengatur irama kerja kolektif yang kadang perlu berhenti untuk mendengarkan, lalu kembali berjalan bersama (Rijal, 2024; Soselisa et al., 2024). Peran pemerintah dalam konteks ini bukanlah tentang penguasaan atas kebijakan, melainkan tentang kemampuan membangun ruang kerja bersama, menyatukan logika birokrasi dan kehidupan warga, serta menyulam kolaborasi menjadi praktik keseharian dalam kebijakan sosial. Ini bukan sekadar perubahan peran, tetapi perubahan cara pandang terhadap makna kekuasaan dalam tata kelola: dari kontrol menjadi koneksi, dari instruksi menjadi inspirasi.

Akademisi sebagai Penerjemah Pengetahuan: Memediasi Ilmu dan Kebijakan

Dalam tata kelola kolaboratif penanganan stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat, peran akademisi lokal tampil sebagai simpul epistemik yang menghubungkan dua dunia yang sering kali berjalan paralel—dunia ilmu pengetahuan dan dunia kebijakan publik. Alih-alih hanya bertindak sebagai pengamat dari luar, para akademisi dari perguruan tinggi di Maluku justru terlibat aktif dalam menyusun dasar-dasar kebijakan yang lebih kontekstual melalui

interpretasi data kesehatan, penyusunan policy brief, hingga advokasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Salah satu informan kunci, seorang dosen kesehatan masyarakat yang kami sebut sebagai F., menjelaskan bagaimana data angka prevalensi stunting dari Dinas Kesehatan sering kali sulit dipahami oleh para pembuat kebijakan di tingkat lokal. Dalam pengalamannya, ia bersama timnya membantu menyederhanakan interpretasi data tersebut ke dalam bentuk grafik sederhana dan narasi yang komunikatif, agar bisa dipahami oleh pemangku kepentingan non-teknis, seperti kepala desa atau tokoh agama. Akademisi berperan sebagai translator epistemik—menerjemahkan bahasa statistik menjadi strategi intervensi yang membumi dan bisa dijalankan di tingkat akar rumput. Tanpa proses ini, kebijakan cenderung tetap berada pada level makro tanpa daya jangkauan yang konkret ke masyarakat.

Observasi lapangan penulis di ruang kerja Unit Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten pada bulan Maret 2025 memperkuat temuan tersebut. Di dinding ruang tersebut terpajang infografis sederhana yang menggambarkan peta distribusi stunting berbasis desa, lengkap dengan ikon visual yang mudah dipahami. Dalam diskusi informal, staf menyebutkan bahwa peta tersebut disusun atas asistensi dari tim akademisi lokal yang tidak hanya menyediakan data, tetapi juga mendampingi proses visualisasi hingga tahap presentasi dalam forum musrenbang. Pendekatan ini menciptakan keterhubungan antara data yang rumit dan keputusan yang praktis—menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat kolaborasi, bukan sekadar simbol otoritas intelektual.

Peran akademisi juga tampak dalam proses penyusunan policy brief yang dijadikan rujukan oleh Bappeda. Dokumen singkat ini disusun dengan pendekatan multi-disipliner yang tidak hanya menampilkan aspek kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Dalam brief tersebut, misalnya, dijelaskan bahwa praktik pemberian makan bayi di sebagian besar desa masih terpengaruh oleh tradisi turun-temurun yang tidak sesuai dengan standar gizi modern. Akademisi kemudian merekomendasikan pendekatan yang tidak konfrontatif, melainkan mengintegrasikan nilai lokal ke dalam kampanye gizi. Hal ini menunjukkan bahwa akademisi tidak hanya menyajikan solusi berbasis data, tetapi juga menjadi jembatan budaya antara nalar ilmiah dan praktik sosial masyarakat.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui konsep knowledge co-production, yakni proses di mana ilmu pengetahuan tidak diciptakan secara sepihak oleh akademisi, tetapi melalui dialog dan pertukaran dengan para pemangku kepentingan lain. Menurut Riggs et al. (2021), co-production pengetahuan tidak hanya meningkatkan legitimasi ilmiah dari kebijakan, tetapi juga memperkuat penerimaan dan keberlanjutan implementasinya. Di Seram Bagian Barat, co-production terlihat dalam bentuk kerja bersama antara akademisi, tokoh masyarakat, dan pejabat daerah dalam merumuskan strategi kampanye gizi yang tidak hanya berbasis data tetapi juga berbasis nilai-nilai lokal.

Keterlibatan akademisi juga memunculkan dampak yang lebih luas, yakni meningkatkan kapasitas reflektif dalam proses kebijakan. Saat wawancara dilakukan dengan seorang pejabat di Bappeda, yang kami sebut Y., ia menyampaikan bahwa keberadaan akademisi membuat proses evaluasi program menjadi lebih tajam karena mereka membawa perspektif luar yang kritis namun konstruktif. Dalam salah satu pertemuan evaluasi program, akademisi tidak segan menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara laporan kegiatan dan dampak nyata di lapangan. Alih-alih menimbulkan ketegangan, masukan tersebut justru disambut sebagai cermin objektif yang mendorong perbaikan tata kelola.

Namun, penting pula dicatat bahwa keterlibatan akademisi tidak sepenuhnya mulus. Terdapat kendala berupa kurangnya penghargaan terhadap kerja intelektual di tingkat daerah, serta terbatasnya dukungan logistik bagi penelitian terapan. Salah satu informan, akademisi berinisial A., mengaku bahwa kadang sulit meyakinkan pihak pemerintah bahwa kerja akademik bukan hanya soal laporan panjang, tetapi tentang pendampingan yang berkelanjutan. Ini menjadi refleksi bahwa agar peran akademisi lebih optimal, diperlukan ekosistem kolaboratif yang mendukung sinergi lintas sektor secara jangka panjang, bukan sekadar kemitraan proyek.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa akademisi berperan sebagai epistemic broker, sebagaimana dikemukakan oleh Andriyani et al. (2024) dan Kusumowidagdo & Tanzil (2024), yaitu aktor yang menjembatani dunia ilmu dan dunia kebijakan melalui kemampuan komunikasi, adaptasi, dan legitimasi ilmiah. Dalam konteks kebijakan stunting di wilayah dengan keterbatasan fiskal seperti Seram Bagian Barat, keberadaan broker ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dibuat berdasarkan keinginan politik, tetapi juga berdasarkan pengetahuan yang akurat, relevan, dan sensitif terhadap konteks lokal. Kontribusi akademisi dalam kebijakan penanganan stunting tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka bukan hanya penghasil pengetahuan, tetapi juga penyulam makna, penghubung dunia, dan penjaga nalar publik dalam upaya kolektif mengatasi masalah yang kompleks. Kolaborasi pengetahuan ini, jika dirawat dengan etika saling menghormati dan komitmen jangka panjang, dapat menjadi fondasi bagi tata kelola kesehatan yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis bukti.

Keterlibatan Pelaku Usaha: CSR sebagai Modal Sosial Baru

Dalam konteks Kabupaten Seram Bagian Barat yang secara geografis terpencil dan fiskal terbatas, keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan stunting bukan hanya berfungsi sebagai penyumbang dana, tetapi lebih jauh menjadi bagian dari penguatan struktur kolaboratif dalam tata kelola publik. Meski jumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah ini relatif kecil dan kapasitas ekonominya tidak sebanding dengan korporasi besar di wilayah urban, mereka tetap mengambil peran melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) yang difokuskan pada upaya perbaikan gizi, sanitasi, dan edukasi masyarakat.

Temuan dari wawancara dengan salah satu staf perusahaan perkebunan lokal, yang kami sebut sebagai B., menunjukkan bahwa partisipasi pelaku usaha didasari oleh kesadaran moral sekaligus kebutuhan untuk menjaga relasi harmonis dengan masyarakat sekitar. B. mengungkapkan bahwa pihak perusahaan beberapa kali diminta oleh pemerintah desa untuk menyediakan dukungan logistik dalam kegiatan posyandu dan penyuluhan gizi. Meskipun bantuan tersebut tidak dalam jumlah besar, keterlibatan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha menyadari pentingnya investasi sosial jangka panjang sebagai bagian dari keberlanjutan operasional mereka.

Observasi lapangan pada awal April 2025 di Desa Kawa, lokasi di mana salah satu perusahaan kayu melakukan operasi terbatas, menunjukkan bentuk konkret dari keterlibatan tersebut. Di halaman Balai Desa, tampak satu unit tenda portabel berlogo perusahaan yang digunakan untuk kegiatan timbang berat badan dan pemberian makanan tambahan bagi balita. Dalam kegiatan tersebut, staf perusahaan terlihat bekerja sama dengan kader kesehatan dan ibu-ibu PKK. Suasana kegiatan berlangsung informal namun terorganisir. Seorang ibu yang hadir dalam kegiatan tersebut menyebutkan bahwa “sejak perusahaan bantu tenda dan susu, kegiatan posyandu lebih ramai dan anak-anak semangat datang.”

Meskipun kontribusi finansial dari perusahaan lokal tidak bisa dikatakan besar, nilai simbolik dan sosialnya cukup kuat. Kehadiran mereka memperluas spektrum kolaborasi dan menegaskan bahwa kebijakan publik tidak melulu menjadi urusan negara. Dalam konteks ini, pelaku usaha bukan sekadar donatur, melainkan bagian dari ekosistem tata kelola sosial yang saling tergantung. Perusahaan membangun *shared value*—nilai bersama—di mana keuntungan bisnis dan kepentingan sosial tidak saling menegasikan, tetapi justru saling memperkuat. Seperti dikemukakan Dang et al. (2021), CSR tidak lagi dipahami hanya sebagai kewajiban moral atau beban hukum, tetapi sebagai strategi bisnis yang berorientasi pada penciptaan nilai sosial yang berkelanjutan dan berdampak luas.

Lebih lanjut, keterlibatan pelaku usaha dalam program stunting juga menjadi saluran baru pembentukan modal sosial institusional, yaitu jejaring kepercayaan dan kerjasama antara sektor privat dan publik. Menurut Prananingrum (2023), modal sosial institusional dalam konteks kebijakan dapat memperkuat legitimasi, mempercepat koordinasi, serta meningkatkan efisiensi distribusi sumber daya. Di Seram Bagian Barat, modal ini mulai terbentuk secara organik melalui komunikasi informal dan keterlibatan simbolik pelaku usaha dalam agenda-agenda pemerintah daerah, seperti Musrenbang Kecamatan dan Forum CSR Daerah. Meski forum-forum ini belum berjalan secara sistematis, namun keberadaan pelaku usaha di dalamnya membuka ruang negosiasi peran yang lebih aktif dan kolaboratif.

Namun demikian, dinamika ini juga tidak terlepas dari tantangan. Salah satu kendala yang diungkap oleh informan dari Dinas Kesehatan, berinisial R., adalah tidak semua pelaku usaha memiliki orientasi sosial yang sama. Ada perusahaan yang hanya muncul saat kegiatan seremoni atau ketika ada liputan media. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *shared value* belum sepenuhnya terinternalisasi dan masih bersifat elitis atau reaktif. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kebijakan daerah yang lebih progresif dalam mengarahkan CSR sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan sosial, bukan sekadar inisiatif sukarela.

Dalam analisis struktural, keterlibatan pelaku usaha di wilayah dengan keterbatasan fiskal seperti Seram Bagian Barat dapat dilihat sebagai respons adaptif terhadap kelompok fiskal negara dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Keterlibatan ini, meskipun masih terbatas, mengindikasikan pergeseran pola hubungan antara negara dan aktor non-negara dari hubungan vertikal ke arah hubungan horisontal yang berbasis kolaborasi. Model seperti ini sesuai dengan pendekatan *collaborative governance* yang dikembangkan Ponte et al. (2021), di mana keterlibatan sektor privat diposisikan sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai pihak eksternal yang pasif.

Kontribusi pelaku usaha dalam penanganan stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat bukan hanya mencerminkan bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga menjelma menjadi modal sosial baru yang memperkuat jejaring kolaboratif antaraktor. Keberadaan mereka memperluas daya jangkauan kebijakan, meningkatkan legitimasi sosial program, serta menanamkan nilai bahwa pembangunan kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Jika kerangka ini dikembangkan secara sistematis, pelaku usaha dapat menjadi agen transformasi sosial yang aktif dalam sistem tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan dan kontekstual.

Komunitas dan Kader: Jantung Kolaborasi dari Bawah

Jika tata kelola kolaboratif kerap diasosiasikan dengan strategi formal yang dimotori aktor-aktor institusional dari atas, maka dinamika di Kabupaten Seram Bagian Barat justru menunjukkan arah sebaliknya. Di desa-desa yang tersebar di wilayah ini, komunitas lokal dan

kader posyandu menjadi aktor utama yang menjaga nadi program penanganan stunting tetap berdetak. Peran mereka melampaui aspek teknis dan administratif. Mereka tidak hanya menyelenggarakan kegiatan timbang berat badan, mencatat data balita, atau membagikan makanan tambahan. Yang lebih fundamental adalah bagaimana mereka menghidupkan semangat kolektif, menyalurkan nilai solidaritas, dan mengaktifkan jaringan sosial yang memperkuat pelaksanaan program secara partisipatif.

Kader posyandu, sebagian besar adalah perempuan muda dan paruh baya, bekerja dalam diam tanpa insentif tetap yang memadai. Dalam wawancara dengan salah satu kader berinisial Y., terungkap bahwa motivasi utamanya bukanlah honor bulanan, melainkan dorongan moral sebagai bagian dari tanggung jawab sosial di tengah komunitasnya. Y. menjelaskan bahwa dirinya merasa terikat secara emosional dengan anak-anak yang datang setiap bulan, dan bahwa “kalau tidak ada kami, siapa lagi yang mau urus mereka?” Kalimat ini bukan sekadar ekspresi individual, tetapi mencerminkan rasa kepemilikan bersama terhadap keberlangsungan program kesehatan di desa. Komitmen emosional seperti ini tidak bisa dibeli dengan regulasi ataupun dana bantuan, tetapi lahir dari proses sosial yang panjang dan relasional.

Hasil observasi lapangan pada bulan Mei 2025 di Desa Piru dan Desa Eti memperkuat temuan ini. Dalam satu sesi posyandu di Balai Dusun Uwen, tampak lima kader lokal berseragam hijau muda sibuk menyiapkan meja timbang dan menata aneka makanan tambahan berupa telur rebus, bubur kacang hijau, dan susu bubuk yang dikumpulkan dari sumbangan warga dan dukungan pelaku usaha setempat. Ibu-ibu datang dengan membawa anak mereka sejak pukul tujuh pagi. Tidak ada megafon pengumuman, tidak ada mobil dinas, tetapi antrean tetap tertib. Beberapa ibu bahkan membantu kader secara spontan, mencatat data berat badan anak-anak mereka. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa posyandu tidak hanya sekadar program, melainkan telah menjelma sebagai ruang sosial di mana relasi antarwarga diperkuat melalui aktivitas pelayanan kesehatan.

Kepercayaan sosial (social trust) yang menjadi fondasi keberhasilan kader dan komunitas dalam menjalankan fungsinya ini sejalan dengan teori Putnam (2020) tentang social capital, yang menekankan pentingnya jejaring kepercayaan dan norma bersama dalam memperkuat kapasitas kolektif masyarakat. Dalam konteks ini, kader posyandu dan komunitas bukan sekadar pelaksana kebijakan, tetapi agen sosial yang membentuk jembatan (bridging social capital) antara struktur pemerintahan dengan realitas warga. Mereka mampu menerjemahkan narasi-narasi kebijakan yang rumit menjadi aksi sederhana yang berdampak langsung terhadap kesehatan anak-anak di lingkungan mereka.

Lebih dari itu, komunitas di Seram Bagian Barat juga menjalankan peran simbolik sebagai pemelihara norma kolektif yang menjaga keberlangsungan program stunting. Di beberapa desa, ditemukan inisiatif warga untuk membuat jadwal piket membantu kader atau bahkan memberikan bantuan logistik secara sukarela. Seorang tokoh adat yang kami wawancarai, berinisial R., menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program kesehatan bukanlah hal baru, sebab “dari dulu sudah ada budaya bantu-bantu, sekarang tinggal disambung dengan program dari pemerintah.” Narasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik dapat berjalan efektif ketika mampu meresap ke dalam nilai-nilai lokal dan dikapitalisasi melalui jaringan sosial yang sudah eksis.

Dalam perspektif collaborative governance, Ponte et al. (2021) menekankan bahwa proses kolaboratif yang berhasil biasanya dimulai dari titik temu antara kapasitas lokal dan fasilitasi struktural. Di Seram Bagian Barat, kapasitas lokal ini tidak hadir dalam bentuk

anggaran atau teknologi, melainkan dalam bentuk modal sosial—kepercayaan, kohesi sosial, dan loyalitas komunitas terhadap nilai kesehatan bersama. Ketika dimobilisasi melalui kader, modal ini berubah menjadi energi sosial yang menggerakkan perubahan dari bawah ke atas (bottom-up).

Namun, keberhasilan ini bukan tanpa tantangan. Beberapa kader mengeluhkan minimnya dukungan logistik, pelatihan, dan perhatian dari dinas teknis. Salah satu informan, berinisial L., menyampaikan bahwa selama dua tahun terakhir belum pernah ada pelatihan lanjutan untuk kader, meskipun tantangan di lapangan semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas dan kader bisa menjadi jantung kolaborasi, tetapi tanpa dukungan struktural yang memadai, mereka juga rentan mengalami kelelahan atau demotivasi.

Pelibatan komunitas dan kader dalam tata kelola kolaboratif penanganan stunting bukan sekadar pilihan teknokratis, tetapi merupakan keharusan strategis dan etis. Mereka berada di garis depan interaksi antara kebijakan dan warga, menjadi penghubung antara idealisme program dan kebutuhan riil masyarakat. Pengakuan terhadap peran mereka tidak hanya harus tercermin dalam bentuk penghargaan simbolik, tetapi juga dalam rancangan kebijakan yang memberi ruang bagi suara dan partisipasi mereka secara setara. Di sinilah makna sejati dari collaborative governance menemukan pijakan: bukan sebagai struktur formal yang kaku, tetapi sebagai jejaring relasional yang hidup dan berdenyut dari bawah.

Media Lokal sebagai Agen Informasi dan Pengawasan Sosial

Dalam dinamika kebijakan publik di daerah tertinggal seperti Kabupaten Seram Bagian Barat, peran media lokal kerap kali dipandang sebelah mata. Namun, justru dalam kondisi keterbatasan sumber daya, kehadiran media lokal menjadi penting sebagai agen informasi yang menjembatani program pemerintah dan masyarakat, serta sebagai pengawas sosial yang menjaga keberlangsungan kebijakan tetap berada dalam rel transparansi dan akuntabilitas. Fungsi ganda ini menjadikan media tidak hanya sebagai pelapor, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam model collaborative governance berbasis pentahelix, yang mengandalkan sinergi antar-sektor secara partisipatif.

Dalam konteks program penurunan stunting, media lokal di Seram Bagian Barat, seperti radio komunitas, portal berita daring lokal, dan grup WhatsApp komunitas, berperan aktif menyampaikan informasi mengenai jadwal kegiatan posyandu, hasil monitoring kesehatan balita, serta agenda intervensi gizi yang dilakukan oleh dinas kesehatan atau mitra non-pemerintah. Dalam wawancara dengan seorang jurnalis lokal berinisial R.T., terungkap bahwa pihaknya secara rutin meliput kegiatan program stunting, baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun inisiatif warga. Menurutnya, media lokal punya tanggung jawab moral untuk “membantu masyarakat tahu, dan membantu pemerintah tetap mendengar.” Pernyataan ini mengilustrasikan posisi media sebagai komunikator ganda yang mengalirkan informasi dua arah: dari atas ke bawah, dan sebaliknya.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa selain menyebarkan informasi, media lokal menjalankan fungsi pengawasan sosial yang tidak kalah penting. Dalam salah satu kasus yang diamati di Kecamatan Kairatu Barat, media lokal melaporkan adanya keterlambatan distribusi makanan tambahan bagi balita gizi kurang di tiga desa. Berita tersebut kemudian memicu respons cepat dari pihak puskesmas dan dinas teknis yang langsung melakukan klarifikasi serta pengiriman ulang bantuan. Peristiwa ini mencerminkan bagaimana informasi yang dipublikasikan secara terbuka dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang mendorong pertanggungjawaban langsung dari pelaksana program.

Observasi lapangan pada bulan Juni 2025 di ruang redaksi salah satu media daring lokal memperlihatkan bagaimana jurnalis bekerja dengan alat yang sederhana—satu komputer bekas, koneksi internet yang tidak stabil, dan hanya dua orang staf aktif—namun tetap mampu menghasilkan berita-berita berkualitas tentang isu kesehatan anak dan stunting. Papan informasi redaksi di dinding kayu tua itu menampilkan jadwal peliputan dari wilayah-wilayah terpencil, termasuk desa-desa pesisir. Meski terbatas, semangat kerja mereka tetap menyala karena merasa bahwa “suara dari kampung harus sampai ke kota,” seperti yang diungkapkan staf redaksi berinisial N.L. Dalam situasi ini, kita menyaksikan bagaimana media lokal bukan hanya menyampaikan berita, tetapi juga mengangkat suara komunitas yang rentan untuk masuk ke dalam diskursus kebijakan.

Secara teoretis, peran ini dapat dijelaskan melalui perspektif public accountability through communication sebagaimana dikemukakan oleh Hieng & Prabawati (2024), yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik tidak cukup hanya dibangun melalui laporan teknis atau audit internal, melainkan harus ditopang oleh komunikasi publik yang terbuka, jelas, dan melibatkan warga sebagai audiens kritis. Komunikasi publik melalui media memungkinkan transparansi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga relasional dan partisipatif. Dalam hal ini, media lokal menjadi kanal demokratisasi informasi yang menyelaraskan antara kinerja pemerintah dengan ekspektasi warga.

Lebih jauh, media juga membentuk arena diskursif tempat berbagai pandangan warga, kritik terhadap program, serta aspirasi terhadap layanan kesehatan dikemukakan secara terbuka. Dalam beberapa laporan yang dianalisis, media lokal memberi ruang bagi tokoh agama, kader posyandu, dan ibu balita untuk menyuarakan pengalaman mereka terhadap layanan posyandu, termasuk kritik terhadap pelaksanaan program yang kurang konsisten atau minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan. Hal ini memperlihatkan bahwa media lokal bukan hanya bekerja atas dasar agenda pemerintah, tetapi juga menciptakan public space yang memperkuat legitimasi sosial dari kebijakan.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi media lokal tidak kecil. Minimnya pendanaan, tekanan dari elite lokal, serta rendahnya literasi media di kalangan masyarakat membuat peran ini berjalan di atas landasan yang rentan. Seorang wartawan media komunitas berinisial Y.K. mengeluhkan bahwa berita-berita tentang stunting jarang mendapat clicks dibandingkan gosip atau berita politik lokal. Tetapi mereka tetap memproduksi berita tentang kesehatan karena menganggapnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial media kepada masyarakat. Komitmen ini menjadi nilai etis yang menopang kredibilitas media lokal dalam tata kelola kolaboratif yang lebih inklusif. Media lokal di Seram Bagian Barat berfungsi sebagai simpul penting dalam tata kelola kolaboratif berbasis Pentahelix, bukan semata-mata karena kapasitas teknologinya, tetapi karena keberadaannya yang melekat pada kehidupan sosial warga, serta kemampuannya untuk menjaga keseimbangan antara informasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Fungsi ini akan semakin efektif jika diikuti oleh penguatan kapasitas media komunitas melalui pelatihan jurnalistik berbasis hak kesehatan masyarakat, dukungan finansial yang tidak mengintervensi independensinya, serta kemitraan yang setara dengan pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah.

Model Implementasi Kolaboratif Pentahelix dalam Konteks Daerah Terbatas: Sinergi, Adaptasi, dan Keberlanjutan

Implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat memperlihatkan bahwa kolaborasi lintas aktor tidak dapat dimaknai sebatas pembagian tugas administratif. Dalam kondisi daerah tertinggal yang ditandai oleh keterbatasan fiskal, sumber daya manusia yang minim, dan tantangan geografis yang kompleks, model kolaboratif berbasis Pentahelix justru menemukan kekuatannya dalam fleksibilitas, relasi sosial, dan kemampuan adaptif antaraktor. Pemerintah daerah sebagai inisiator kebijakan tidak dapat bekerja secara linier; keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada intensitas hubungan dan kesetaraan posisi antara kelima pilar Pentahelix: pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media.

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya terletak pada struktur kelembagaan, tetapi lebih pada trust-building atau pembangunan kepercayaan antar aktor. Seorang pejabat di Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), berinisial M.T., mengungkapkan bahwa “kerja sama dengan perguruan tinggi dan media lokal baru berjalan efektif ketika tidak ada rasa saling curiga; ketika duduk sama rendah dan saling belajar.” Pernyataan ini merefleksikan dimensi kultural dari kolaborasi, yang mengandaikan hubungan yang bukan hanya formal, tetapi juga emosional dan sosial. Dalam konteks inilah teori *Collaborative Capacity* dari Depari (2023) menjadi penting, karena menjelaskan bahwa kapasitas kolaboratif tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan struktur, melainkan oleh dinamika relasi, interdependensi, dan komunikasi antaraktor.

Model yang terbangun dari sintesis data lapangan memperlihatkan tiga pilar utama dalam kolaborasi kebijakan yang efektif di daerah dengan keterbatasan, yakni: sinergi yang partisipatif, adaptasi yang kontekstual, dan keberlanjutan yang berbasis jejaring. Pertama, sinergi yang partisipatif terjadi ketika setiap aktor diberi ruang untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan konteksnya. Dalam sebuah diskusi komunitas di Desa Luhu, misalnya, perwakilan organisasi ibu-ibu PKK menyampaikan bahwa pihaknya “tidak hanya membantu di dapur, tapi ikut dalam penyusunan jadwal kegiatan posyandu dan edukasi gizi,” yang mengindikasikan adanya pelibatan komunitas secara aktif dalam proses perencanaan, bukan hanya implementasi.

Kedua, adaptasi yang kontekstual terlihat dalam cara pelaku usaha lokal terlibat dalam pemenuhan kebutuhan program. Salah satu pelaku UMKM makanan sehat di Kecamatan Taniwel mengaku bahwa ia diminta untuk menyediakan makanan tambahan bagi balita berdasarkan bahan lokal seperti pisang, keladi, dan ikan rono. Keputusan untuk menggunakan bahan lokal bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga adaptasi terhadap selera dan kebiasaan konsumsi masyarakat. Ini memperlihatkan bahwa pelaku usaha tidak diposisikan sebagai penyedia jasa semata, melainkan sebagai mitra dalam proses sosial yang kompleks, selaras dengan pendekatan adaptive governance yang menekankan pentingnya respons kebijakan terhadap dinamika lokal (Mukhlis & Perdana, 2022; Nurkaidah et al., 2024; Rahadian et al., 2024).

Ketiga, keberlanjutan yang berbasis jejaring muncul melalui mekanisme koordinasi informal yang tumbuh dari bawah. Observasi lapangan di Kecamatan Huamual Belakang menunjukkan bahwa para aktor dari kelima unsur Pentahelix berkumpul secara rutin di balai desa setiap akhir bulan untuk saling berbagi informasi perkembangan balita, tantangan yang dihadapi, serta merancang agenda bersama. Meski tidak ada surat keputusan formal tentang forum ini, keberadaannya menjadi praktik kolaborasi yang hidup dan otentik. Ruang balai

desa yang sederhana, dengan dinding tripleks dan papan tulis bertuliskan angka-angka status gizi, menjadi saksi bisu dari upaya gotong-royong lintas sektor dalam mengatasi stunting secara berkelanjutan.

Analisis juga menunjukkan bahwa peran akademisi tidak sekadar memberikan data atau evaluasi teknis, tetapi menjadi fasilitator pengetahuan yang menjembatani pemahaman antaraktor. Salah satu dosen dari perguruan tinggi di Ambon, berinisial F.L., menuturkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pelatihan kader posyandu berbasis pada budaya lokal, seperti menggunakan peribahasa dan cerita rakyat dalam menyampaikan pesan kesehatan. Pendekatan ini memperkuat legitimasi sosial kebijakan karena menghubungkan antara sains dan budaya secara integratif. Dalam konteks collaborative capacity, peran akademisi semacam ini dapat dipahami sebagai knowledge bridge yang mampu membangun pemahaman bersama (shared meaning), yang menjadi fondasi penting dalam setiap upaya kolaborasi lintas sektor.

Secara keseluruhan, model implementasi kebijakan berbasis Pentahelix yang muncul dari konteks Seram Bagian Barat tidak bekerja dalam kerangka linier dan top-down, tetapi bersifat iteratif dan partisipatif. Kolaborasi tidak hanya dibentuk oleh dokumen MoU atau forum resmi, tetapi tumbuh dari proses negosiasi sosial yang terus-menerus. Keberhasilan kebijakan dalam menurunkan angka stunting di wilayah ini tidak terletak pada intervensi teknokratis semata, tetapi pada ketahanan relasi sosial, kepekaan terhadap konteks lokal, serta komitmen bersama yang dibangun melalui kehadiran rutin, komunikasi terbuka, dan rasa memiliki yang kolektif. Model ini memberi pelajaran bahwa dalam konteks keterbatasan fiskal dan infrastruktur, justru relasi sosial menjadi modal utama keberhasilan kebijakan. Dengan demikian, pendekatan collaborative governance yang digabungkan dengan kerangka Pentahelix dapat ditransformasikan menjadi model yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga resilien secara sosial dan kultural.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks wilayah tertinggal dengan keterbatasan fiskal seperti Kabupaten Seram Bagian Barat, tata kelola kolaboratif berbasis model Pentahelix bukan hanya mungkin diterapkan, tetapi justru menjadi prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kolaboratif yang melibatkan lima aktor utama—pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media—mampu menciptakan mekanisme kerja yang dinamis dan adaptif, selama relasi antaraktor dibangun di atas fondasi kepercayaan, komunikasi partisipatif, dan kepemimpinan yang inklusif. Keberhasilan program tidak bergantung pada kecukupan anggaran semata, melainkan pada kapasitas sosial dari jejaring yang terbentuk, kemampuan adaptasi terhadap konteks lokal, serta kesediaan semua pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses bersama. Dengan demikian, integrasi antara pendekatan collaborative governance dan kerangka Pentahelix dalam penelitian ini tidak hanya menjawab tujuan analitis untuk memahami strategi implementasi kebijakan di tengah keterbatasan, tetapi juga menawarkan kontribusi konseptual baru dalam studi administrasi publik, yakni pentingnya menjadikan kolaborasi sebagai praktik sosial yang kontekstual, reflektif, dan berorientasi keberlanjutan dalam kebijakan kesehatan masyarakat di wilayah marginal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akapip, N., & Kissya, V. (2023). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Membangun Ekosistem Kewirausahaan Pariwisata Bahari Berkelanjutan di Negeri Hukurila, Kota Ambon. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(1), 50–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.30598/populisvol18iss1pp50-64>
- Andriyani, Y., Suropto, Yohanitas, W. A., Kartika, R. S., & Marsono. (2024). Adaptive innovation model design: Integrating agile and open innovation in regional areas innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(1), 100197. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100197>
- Astuti, S. J. W., Suindyah Dwiningwarni, S., & Atmojo, S. (2025). Modeling environmental interactions and collaborative interventions for childhood stunting: A case from Indonesia. *Dialogues in Health*, 6, 100206. <https://doi.org/10.1016/j.dialog.2025.100206>
- Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice*, 2(1), 14.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5 (ed.)). Sage Publications.
- Dang, H. N., Hoang, K., Vu, V. T., & Nguyen, L. Van. (2021). Do socially responsible firms always disclose high-quality earnings? Evidence from an emerging socialist economy. *Asian Review of Accounting*, 29(3), 291–306. <https://doi.org/10.1108/ARA-11-2020-0174>
- Depari, C. (2023). Assessing Community Participation in A Rural Collaborative Placemaking: Case of Trucuk Sub-village, Bantul Regency, Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 11(2), 111–129. <https://doi.org/10.22500/11202346563>
- Fadhil, M., Zulkarnain, Z., Zulkarnaini, Z., & Juliansyah, R. (2025). Between State and Society: Government Communication Strategies and Stakeholder Collaboration for Tourism Development in the Pantai Batee Puteh Area, West Aceh. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 3(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol3iss1pp49-66>
- Ferrazzi, G. (Gabe). (2022). Decentralization, Local Governance, and Localizing the Sustainable Development Goals in Indonesia. In *Decentralization, Local Governance, and Localizing the Sustainable Development Goals in Asia and the Pacific* (pp. 253–274). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003282297-10>
- Hieng, B. B., & Prabawati, N. P. A. (2024). Digital Transformation in Villages: A Policy Implementation Approach in Kajowair Village, Nusa Tenggara Timur. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2), 189–198. <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol2iss2pp189-198>
- Kusumowidagdo, A., & Tanzil, M. Y. (2024). The Collaboration Between Academic and Industry in Creative Industry and Sustainability-Based Programs: The Academic Perspective. In *International Conference on Sustainability in Creative Industries* (pp. 141–151). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-48453-7_14
- Lim, W. M. (2025). What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines. *Australasian Marketing Journal*, 33(2), 199–229. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Litaay, S. C. H., & Batjo, S. N. (2024). Women's Welfare, Stunting, and Access to Reproductive Rights: An Overview of The Situation in Indonesia. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 1(3), 332–343.
- Maulana, M., Hanafi, S. M., & Azwar, B. (2022). Model Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Perlang Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 1(2), 97–107.
- Mukhlis, M., & Perdana, R. (2022). A Critical Analysis of the Challenges of Collaborative Governance in Climate Change Adaptation Policies in Bandar Lampung City, Indonesia. *Sustainability*, 14(7), 4077. <https://doi.org/10.3390/su14074077>
- Nugroho, H. Y. S. H., Basuki, T. M., Pramono, I. B., Savitri, E., Purwanto, Indrawati, D. R., Wahyuningrum, N., Adi, R. N., Indrajaya, Y., Supangat, A. B., Putra, P. B., Auliyani, D., Priyanto, E., Yuwati, T. W., Pratiwi, Narendra, B. H., Sukmana, A., Handayani,

- W., Setiawan, O., & Nandini, R. (2022). Forty Years of Soil and Water Conservation Policy, Implementation, Research and Development in Indonesia: A Review. *Sustainability*, 14(5), 2972. <https://doi.org/10.3390/su14052972>
- Nurhidayah, L., Davies, P., Alam, S., Saintilan, N., & Triyanti, A. (2022). Responding to sea level rise: challenges and opportunities to govern coastal adaptation strategies in Indonesia. *Maritime Studies*, 21(3), 339–352. <https://doi.org/10.1007/s40152-022-00274-1>
- Nurkaidah, Anas, A., & Baharuddin, T. (2024). Implementation of environmental policies on the development of a new capital city in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2297764. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2297764>
- Octavia, D., Suharti, S., Murniati, Dharmawan, I. W. S., Nugroho, H. Y. S. H., Supriyanto, B., Rohadi, D., Njurumana, G. N., Yeny, I., Hani, A., Mindawati, N., Suratman, Adalina, Y., Prameswari, D., Hadi, E. E. W., & Ekawati, S. (2022). Mainstreaming Smart Agroforestry for Social Forestry Implementation to Support Sustainable Development Goals in Indonesia: A Review. *Sustainability*, 14(15), 9313. <https://doi.org/10.3390/su14159313>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ponte, S., Noe, C., & Mwamfupe, A. (2021). Private and public authority interactions and the functional quality of sustainability governance: Lessons from conservation and development initiatives in Tanzania. *Regulation & Governance*, 15(4), 1270–1285. <https://doi.org/10.1111/rego.12303>
- Prananingrum, R. (2023). Social Capital and Its Role in the Development of Tambi Coffee. *Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR)*, 2(1), 49–63.
- Putnam, R. D. (2020). *Bowling alone: The collapse and revival of American community* (10th ed.). Simon and schuster.
- Putri, E. I. K., Dharmawan, A. H., Hospes, O., Yulian, B. E., Amalia, R., Mardiyarningsih, D. I., Kinseng, R. A., Tonny, F., Pramudya, E. P., Rahmadian, F., & Suradiredja, D. Y. (2022). The Oil Palm Governance: Challenges of Sustainability Policy in Indonesia. *Sustainability*, 14(3), 1820. <https://doi.org/10.3390/su14031820>
- Rahadian, M. E., Sanafiah, A. A., Basseng, B., & Asropi, A. (2024). Implementation of the Pentahelix Collaborative Governance Model Minimum Service Standards (SPM) for Health with Hypertension in Local Governments. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 9(1), 68–85. <https://doi.org/10.15294/jpi.v9i1.3606>
- Riggs, R. A., Achdiawan, R., Adiwinata, A., Boedhihartono, A. K., Kastanya, A., Langston, J. D., Priyadi, H., Ruiz-Pérez, M., Sayer, J., & Tjiu, A. (2021). Governing the landscape: potential and challenges of integrated approaches to landscape sustainability in Indonesia. *Landscape Ecology*, 36(8), 2409–2426. <https://doi.org/10.1007/s10980-021-01255-1>
- Rijal, R. (2024). Community-Based Health Movement: Social Innovation and Stunting Revolution in Supiori Regency. *BAILEO: JURNAL SOSIAL HUMANIORA*, 1(2), 127–140.
- Rusli, A. A., Tuanaya, W., & de Fretes, J. (2023). Kolaborasi Multi-aktor dalam Ekowisata Mangrove: Transformasi Sosial dan Ekonomi Berbasis Komunitas di Desa Waiheru, Maluku. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.30598/populisvol18iss1pp1-15>
- Soamole, S. R., & Rolobessy, M. J. (2024). Optimization of the Implementation of the Livable Housing Assistance Policy by the Kepulauan Sula Regency. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 1(2), 113–126.
- Soselisa, P. S., Alhamid, R., & Rahanra, I. Y. (2024). Integration of Local Wisdom and Modern Policies: The Role of Traditional Village Government In The Implementation of Sasi In Maluku. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 63–75. <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol2iss1pp63-75>
- Sutikno, C., Atika, Z. R., Wijaya, S. S., & Zaelani, A. (2022). Collaborative Governance In The

- Development Of Tourist Village In Karangsalam Village, Baturaden District, Banyumas Regency. *DYNAMICS: Journal of Public Administration*, 1(1), 36–47.
- Tondang, D., Kotarumalos, A., & Muhtar, M. (2023). Beyond The Ballot: Analyzing The Failure of Female Legislative Candidates in Local Indonesian Politics. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol1iss1pp83-98>
- Udiyasa, K. (2023). Kolaborasi Triple Helix dalam Program Inovasi Desa: Mendorong Ekonomi Berbasis Pengetahuan di Desa Poka, Kota Ambon. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(1), 32–49.
- Wadipalapa, R. P., Katharina, R., Nainggolan, P. P., Aminah, S., Apriani, T., Ma'rifah, D., & Anisah, A. L. (2024). An Ambitious Artificial Intelligence Policy in a Decentralised Governance System: Evidence From Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 43(1), 65–93. <https://doi.org/10.1177/18681034231226393>
- Warat, A. R. (2024). Komunikasi Organisasi dalam Tata Kelola Desa: Interaksi Multiarah untuk Mendorong Partisipasi Pembangunan. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.30598/populisvol17iss1pp46-62>
- Wicaksono, A., Fitri, E. S. M., Anggara, T., & Sum, S. (2025). The One-Gate Management System And Temple Conservation: A Comparative Study Of Borobudur And Angkor Wat Temples. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2), 159–175.
- Wisnumurti, A. A. G. O., Candranegara, I. M. W., Suryawan, D. K., & Wijaya, I. G. N. (2020). Collaborative Governance: Synergy Among the Local Government, Higher Education, and Community in Empowerment of Communities and Management of Potential Tourism Village. *2nd Annual International Conference on Business and Public Administration (AICoBPA 2019)*, 112–115.
- Wyborn, C. A., van Kerkhoff, L. E., Colloff, M. J., Alexandra, J., & Olsson, R. (2023). The politics of adaptive governance: water reform, climate change, and First Nations' justice in Australia's Murray-Darling Basin. *Ecology and Society*, 28(1).